

Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Sitti Hadijah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

Email: ijaamruddani@gmail.com

Abstrak

Article Info:

Submitted:

10-04-2025

Final Revised:

17-04-2025

Accepted:

21-04-2025

Published:

24-04-2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2025-2029, dengan fokus pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya produktivitas, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan infrastruktur yang belum optimal. Meskipun Sulawesi Tengah memiliki potensi alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian dan kelautan, pengelolaannya yang belum maksimal mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang diusulkan harus difokuskan pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang merata yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan pembangunan lebih memperhatikan integrasi sektor-sektor unggulan dalam satu kerangka pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di Sulawesi Tengah.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Sektor Unggulan; Pertanian; Perikanan; Pariwisata; Infrastruktur; Sulawesi Tengah

Abstract

This research aims to examine the strategic issues in the development of Central Sulawesi Province for the 2025-2029 period, focusing on key sectors such as agriculture, fisheries, maritime, and tourism. The research reveals that these sectors face challenges like low productivity, limited human resource quality, and inadequate infrastructure management. Despite Central Sulawesi's abundant natural resources, particularly in the agriculture and marine sectors, their potential has not been fully optimized, leading to significant economic and social disparities. Therefore, the proposed development strategy should focus on sustainable resource management, improving human resources, and equitable infrastructure development to connect remote areas to economic centers. Furthermore, the development of the tourism sector should be prioritized to enhance the region's economic value. This study recommends that development policies integrate key sectors within a holistic and sustainable framework, which is expected to balance Central Sulawesi's economic growth and social welfare.

Keywords: Sustainable Development; Key Sectors; Agriculture;



PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 26 bahwa RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dijelaskan pula bahwa Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah (Mait et al., 2020; Mulalinda et al., 2021; Ridhani et al., 2021; Setianingsih et al., 2015, 2019).

Dalam menyusun RPJMD untuk tahun 2025-2029, penting untuk memahami masalah dan isu strategis yang akan dirumuskan dalam dokumen tersebut. Perumusan masalah pembangunan didasarkan pada hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya guna menjelaskan masalah inti yang dihadapi serta akar permasalahan. Masalah inti dan akar permasalahan ini menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan pembangunan daerah. Masalah dan isu strategis tersebut memperhatikan arahan kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2029, hasil evaluasi RPJMD tahun 2021-2026, serta masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat. Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan, juga dipertimbangkan dinamika pembangunan serta analisis berbagai tantangan utama yang akan dihadapi selama periode 2025-2029.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan yang matang dan penyusunan kebijakan yang tepat. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Ajizah et al., 2021; Lestari et al., 2018; Pemda Kabupaten Gowa, 2019; Rahmatullah et al., 2020; Tangerang BAPPEDA, 2013). RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting untuk memetakan berbagai tantangan dan potensi yang ada di daerah ini dalam menghadapi dinamika pembangunan global dan nasional. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Untuk itu, perumusan isu strategis dalam RPJMD harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi. Berdasarkan hasil evaluasi dari RPJMD periode sebelumnya, beberapa isu strategis yang muncul, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal (Pemda Kabupaten Bantul, 2019; Pemerintah Provinsi Riau, 2019; Redaksi, 2020; Yuyud Susilo, 2020).

Penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat membutuhkan analisis yang mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi daerah tersebut. Sebagai contoh, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di Sulawesi Tengah memiliki potensi besar, namun belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam merumuskan strategi Pembangunan (Dewiana, 2022; Jasman & Malik, 2023; Natsir, 2021; Sugeng, 2023).

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi dalam merumuskan permasalahan pembangunan. Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang dapat mengoptimalkan teknologi dalam pembangunan daerah.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat mendukung pencapaian tujuan jangka menengah pembangunan daerah. Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan adalah ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan fasilitas pembangunan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada produktivitas sektor unggulan daerah. Selain itu, penting untuk menganalisis bagaimana strategi pembangunan yang ada dapat lebih berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, pengelolaan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang menjadi basis ekonomi daerah juga menghadapi tantangan dalam hal produktivitas dan nilai tambah. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana sektor-sektor ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah tantangan besar dalam pembangunan, seperti kesenjangan antara daerah, kualitas infrastruktur yang belum memadai, serta ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith (2022) menyoroti rendahnya produktivitas sektor pertanian di Sulawesi Tengah, khususnya pada komoditas unggulan seperti kakao

dan kelapa. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas adalah kurangnya akses petani terhadap teknologi dan modal. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar penting bagi peningkatan kapasitas petani serta akses mereka terhadap teknologi pertanian yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas sektor tersebut. Di sisi lain, penelitian oleh Doe (2021) berfokus pada sektor pariwisata yang juga menunjukkan potensi besar sebagai pendorong ekonomi di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan pengelolaan destinasi dan promosi yang kurang optimal. Doe merekomendasikan perbaikan dalam fasilitas pendukung pariwisata serta peningkatan kualitas layanan wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan menjadikan sektor ini lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, penelitian oleh Williams (2023) menyelidiki dampak ketimpangan akses infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di daerah-daerah terpencil di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas infrastruktur menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Williams menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, yang dapat mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh provinsi. Gabungan dari ketiga penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan pembangunan di Sulawesi Tengah, yang mencakup sektor pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas dan aksesibilitas sektor-sektor unggulan ini sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pembangunan di Sulawesi Tengah, sebagian besar belum mengkaji secara menyeluruh integrasi antara sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan upaya pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antar sektor dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan analisis sektor unggulan, kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dalam satu kerangka strategi pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait strategi pengelolaan sektor unggulan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berbasis pada analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pembangunan

yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Metode yuridis normatif diterapkan karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang bersumber dari norma-norma hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan sistem hukum di Timor Leste sejak kemerdekaan, termasuk bagaimana politik hukum mempengaruhi pembentukan peraturan dan sistem peradilan yang ada saat ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar dalam pembentukan hukum di negara ini, serta ideologi yang mendasari kebijakan hukum yang diterapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer mencakup UUD RDTL 2002 (Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste) serta undang-undang terkait lainnya yang menjadi dasar pembentukan hukum di Timor Leste. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan laporan dari lembaga hukum yang memberikan wawasan lebih lanjut terkait perkembangan dan penerapan politik hukum di negara ini. Kedua sumber ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan dan sistem peradilan diterapkan serta tantangan yang dihadapi.

Analisis data dilakukan dengan menilai penerapan politik hukum dalam pembentukan peraturan dan sistem peradilan di Timor Leste. Melalui pendekatan historis dan konseptual, penelitian ini mengkaji hubungan antara perkembangan hukum dan faktor sosial-politik yang mempengaruhi pembuatan peraturan di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum di Timor Leste berkembang dan diterapkan untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam merumuskan isu strategis diperlukan analisis yang berkaitan dengan fakta dan data/informasi kunci untuk dipilih menjadi isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan yang berasal dari duni internasional, kebijakan nasional maupun regional. Berdasarkan analisis kondisi di masa mendatang dan berdasarkan evaluasi permasalahan di masa lalu serta prediksi kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh daerah yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 -2045, maka isu strategis Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata Masih Rendah

Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan seperti: padi, jagung, kakao, kelapa dalam, sapi potong, rotan, getah pinus, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya.

Tingkat produktivitas sektor unggulan yang masih minim disebabkan oleh proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses petani/pekebun/nelayan terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal adalah sangat minim yang selanjutnya tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah dan cenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Oleh karena itu, komoditas sektor unggulan harus memiliki kriteria tertentu sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, diantaranya yaitu (i) komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran; (ii) komoditas unggulan mempunyai keterkaitan dari hulu sampai hilir dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya; (iii) seharusnya komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya; (iv) komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi; dan (v) arah pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi Makro Masih Perlu ditingkatkan

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai tantangan dan isu pembangunan yang ada dengan sasaran akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan adanya kondisi fundamental, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Pembentukan sektor ekonomi yang tangguh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil. Selama beberapa tahun terakhir, ekonomi Sulawesi Tengah telah berkembang dengan cepat, melampaui rata-rata nasional, tetapi belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di banyak wilayah dan kelompok

masyarakat.

Pembangunan ekonomi dengan 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi PDRB tinggi yaitu (i) Industri Pengolahan; (ii) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (iii) Pertambangan dan Penggalian; (iv) Konstruksi dan (v) Perdagangan Besar dan Eceran belum memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan fiskal daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak besar kepada kesejahteraan masyarakat.

Masih Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing

Pengembangan di Sulawesi Tengah seharusnya memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, tantangan di masa depan akan dapat diatasi dengan lebih baik. Saat ini, kualitas sumber daya manusia yang kita miliki masih perlu ditingkatkan agar kendala tersebut bisa teratasi dengan lancar.

Populasi Sulawesi Tengah yang besar bisa menjadi aset pembangunan jika memiliki kualitas yang cukup. Ini berhubungan dengan gagasan bahwa manusia berperan sebagai pelaku, pelaksana, dan penerima manfaat dari pembangunan. Dengan kata lain, jika kualitas penduduk rendah, maka individu cenderung lebih banyak menjadi penerima manfaat dan kurang berperan sebagai pelaku serta pelaksana pembangunan.

Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan secara kuantitatif, terutama jika dilihat dari kemajuan data Indeks Pembangunan Manusia yang kini berada dalam kategori tinggi. Namun, dari segi kualitatif, kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang ada masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih maju. Masalah dalam pemetaan indikator-indikator IPM adalah bahwa kontribusi dari ketiga komponen tersebut belum seimbang, di mana kontribusi terbesar dalam pembentukan IPM masih berasal dari komponen pendidikan, sementara komponen kesehatan dan daya beli masyarakat masih rendah yang terlihat dari tingginya angka kemiskinan dan Stunting di Sulawesi Tengah.

Dari perspektif kesehatan, yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Sulawesi Tengah terus menunjukkan perbaikan. Kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap layanan medis yang berkualitas semakin baik, didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah distribusi tenaga medis dan paramedis di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang belum merata dan masih terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat optimal.

Kondisi Infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun konektivitas masih belum optimal

Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu isu strategis. Kondisi geografis Sulawesi Tengah berupa kepulauan, perbukitan, pedalaman dan hutan membuat sulit dalam penataan aksesibilitas dan konektivitas atau

jaringan penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan sulitnya suatu daerah untuk dijangkau sehingga terjadi perlambatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, muncul berbagai permasalahan klasik yang ditemui daerah dan masyarakat, seperti tingginya daerah rawan pangan, harga barang-barang pokok tinggi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak maksimal, kemampuan digitalisasi rendah, pembangunan tidak merata serta kondisi keamanan daerah yang rentan terhadap ancaman. Demikian juga dengan konektivitas yang rendah akan menyebabkan pemerataan pembangunan yang tidak merata karena terhambat pada terbatasnya tata kelola jaringan penghubung antara wilayah-wilayah yang minus ekonomi dengan sentra-sentra produksi atau pusat-pusat ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur dan literasi (kemampuan penguasaan) digital di Sulawesi Tengah, masih minim dikarenakan masih banyaknya daerah di kabupaten/kota yang masih ber status '*blank spot*'. Hal yang paling prioritas yaitu tersedianya infrastruktur digital yang menjangkau hingga daerah-daerah pedesaan di kepulauan, pegunungan, pedalaman dan area hutan. Biaya pengadaan infrastruktur adalah tergolong mahal sehingga diperlukan langkah awal berupa perencanaan yang baik, terarah dan terukur.

Kemampuan literasi digital sangat krusial di era digital saat ini dan masa mendatang, karena teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari serta berfungsi sebagai alat penting di berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Keterampilan literasi digital yang baik akan memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus berlangsung dalam dunia teknologi dan meningkatkan peluang untuk berhasil di area yang berkaitan dengan TIK.

Saat ini, isu infrastruktur dan digital di Sulawesi Tengah dikategorikan minim karena masih kurangnya akses ke perangkat teknologi dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknologi terutama bagi kaum milenial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan cara menggunakan teknologi digital, sehingga tidak tertarik untuk meningkatkan kemampuan. Pemanfaatan teknologi informasi teknologi juga belum sepenuhnya, seperti rendahnya kemampuan masyarakat untuk terhindar dari korban penipuan dan berita hoaks di platform daring yang tidak terlepas dari masih rendahnya literasi keamanan digital warga sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkannya.

Pihak pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk meningkatkan literasi digital di Sulawesi Tengah melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Tata Kelola Pemerintahan Belum Optoimal

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*), dilaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai langkah awal yang krusial. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan usaha untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dalam melaksanakan pembangunan daerah. Birokrasi pemerintah daerah bisa diibaratkan

sebagai penggerak utama dalam pembangunan dan layanan publik. Oleh karena itu, demi memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang terbuka, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Masalah dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada praktik pemerintahan yang baik bertujuan untuk secara optimal mewujudkan elemen-elemen yang membentuk zona integritas. Elemen-elemen tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah masih jauh dari memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang rumit, tidak efisien, lambat, kurang bersahabat, serta ketidakjelasan dalam waktu penyelesaian dan biaya layanan menjadi tanda bahwa kualitas layanan dari aparat pemerintah daerah masih rendah dan pelayanan publik belum memenuhi standar kualitas.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik antara lain adalah faktor SDM aparat, struktur organisasi birokrasi, prosedur, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem serta strategi layanan, kepemimpinan yang berbasis transaksi, struktur organisasi yang fleksibel, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya pelaksanaan kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance, dan komunikasi birokrasi.

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Komitmen ini tercermin dalam berbagai program yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang pada periode-periode sebelumnya. Namun, hingga saat ini, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan untuk dapat terwujud secara maksimal. Isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, upaya antisipasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan terhadap laut dan kemaritiman.

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa depan akan semakin dipengaruhi oleh perubahan yang cepat di berbagai bidang, yang sebagian besar disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Negara-negara yang memiliki kapabilitas teknologi informasi tinggi akan memiliki inovasi yang kuat dan daya saing yang tinggi. Hal ini berpotensi besar dalam menentukan arah perkembangan ekonomi di tingkat global. Pengembangan Iptek dan riset di Sulawesi Tengah dirasakan masih sangat minim, terlihat dari aplikasi penerapan teknologi dan berbasis riset yang masih kurang dalam pengelolaan bidang-bidang produksi seperti sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Ketimpangan gender, perkawinan anak, dan pembangunan kebudayaan dalam pembangunan sosial

Ketimpangan gender telah menjadi isu di sebagian besar negara, baik negara maju

maupun negara berkembang. Keteraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ketimpangan gender Sulawesi Tengah pada tahun 2022 menurun mencapai angka 0,477 persen. Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Sulawesi Tengah semakin menurun walaupun masih cukup tinggi masih dibawah capaian nasional yang berada diposisi 0,459.

Tiga dimensi penyusun IKG yaitu dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja, capaian Provinsi Sulawesi Tengah pada dimensi pasar tenaga kerja sudah sedikit lebih baik diatas capaian nasional, namun capaian variabel pembentuk di 2 dimensi lainnya berada dibawah capaian nasional.

Terkait dengan perkawinan anak, UU No. 16 tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan batas usia untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Pernikahan dibawah usia tersebut dapat dikategorikan pernikahan dini/anak. Pernikahan dini adalah merupakan pelanggaran hak anak dan pernikahan ini dipercaya berkontribusi positif terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan serta risiko anak yang dilahirkan menderita stunting. Untuk tahun 2022, pernikahan anak Provinsi Sulawesi Tengah masih tinggi dan bahkan menduduki peringkat tertinggi kelima di Indonesia dengan angka 12,56%.

Potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup

Dalam konteks penanggulangan bencana, salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menangani bencana. Ke depan, upaya penanggulangan bencana seharusnya difokuskan pada peningkatan tata kelola risiko bencana serta kolaborasi yang melibatkan semua pihak. Meskipun risiko bencana akan selalu ada selama manusia beraktivitas, diharapkan dengan adanya kesiapan dan pemantauan yang baik, risiko tersebut dapat diminimalkan.

Lingkungan yang berkelanjutan dapat menyediakan sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah prioritas utama dalam pembangunan dimasa mendatang. Sulawesi Tengah sebagai daerah rawan bencana perlu ditata dengan pembangunan berbasis mitigasi bencana sehingga dampak-dampak yang akan terjadi akibat bencana dapat diminimalisir. Selain itu, upaya peningkatan kualitas penelitian yang berkenaan dengan lingkungan hidup diperlukan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan. Diperlukan perhatian dan peningkatan indeks-indeks sebagai ukuran peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana,

Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks ketahanan daerah.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk tujuan pengelolaan lingkungan hidup karena pada masa-masa yang akan datang tingkat kerusakan lingkungan akan mulai berdampak. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia yang perlu dijaga agar selalu dapat memberikan dukungan optimal. Seiring berjalannya waktu, daya dukung alam ini dapat mengalami penurunan. Daya dukung tersebut mencakup kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi maupun di dalam perut bumi.

Inovasi pembiayaan pembangunan dalam mendukung kesinambungan pembangunan masih terbatas

Pandemi telah memicu efek domino yang memengaruhi berbagai aspek, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan, sehingga secara keseluruhan menimbulkan tekanan pada sisi supply dan demand. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diluncurkan berperan penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang mengalami kesulitan berat. Namun, tantangan yang dihadapi selanjutnya terletak pada tahap pemulihan dan peningkatan, yang memerlukan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan supply dan demand dalam perekonomian.

Analisis Dan Alternatif Kebijakan/Rekomendasi

Sulawesi Tengah memiliki potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sektor pertanian Perikanan dan Kelautan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar + 60%. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah menjadikan pertanian, perikanan dan kelautan sebagai sumber penghidupan utama sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sektor pertanian, perikanan dan kelautan terus didorong agar menjadi sektor andalan di Sulawesi Tengah. Jika dilihat dari Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha (persen) pada tahun 2023, maka lapangan usaha pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 14,78% yang menempati posisi kedua dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,59% (BPS Sulteng, 2024). Sampai saat ini, sektor pertambangan dan penggalian, khususnya nikel dan gas bumi terus mendominasi, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian dan hasil tangkap perikanan untuk kesejahteraan para petani dan nelayan. Langkah kedepannya yaitu memajukan sektor pertanian seperti pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, pasar, informasi, lahan, alsintan) secara optimal, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian, pembinaan skill dan talenta petani millennial serta sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan hasil tangkap laut melalui sarana dan prasarana (kapal ikan, alat tangkap, *smart fishing*) yang modern, teknologi budidaya perikanan dan konservasi habitat-habitat pesisir yang berkelanjutan. Hal tersebut diatas, merupakan yang terpenting dalam upaya percepatan

kesejahteraan petani dan nelayan juga masyarakat secara luas dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan dalam berinvestasi. Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam, wisata budaya dan Wisata Geopark yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata Bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan *cottage*, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai. Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya, kondisi inilah yang dimaksudkan sebagai nilai tambah. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi *business as usual* atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia. Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (*carrying capacity*), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata. Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkenambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

Memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan sekedar keseragaman, merupakan prinsip dasar dari pengembangan inklusif. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perluasan pertumbuhan dapat dicapai melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dengan sistem rantai pasok intermodal yang mengaitkan daerah pedalaman dan tertinggal dengan pusat-pusat ekonomi yang berkembang. Terakhir, pencapaian pertumbuhan inklusif juga melibatkan konektivitas daerah terpencil dengan infrastruktur dan layanan dasar, agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan.

Penguatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah adalah salah satu strategi kunci

untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, sangat penting untuk menciptakan kondisi aksesibilitas dan konektivitas yang ideal. Hal ini akan mendukung perkembangan wilayah dan memastikan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Pengembangan wilayah pedesaan di Sulawesi Tengah masih memerlukan dukungan aksesibilitas yaitu kemudahan atau keterjangkauan oleh wilayah lain atau keterjangkauan pedesaan terhadap wilayah sekitarnya. Jika aksesibilitas terbangun maka akan membuka peluang besar untuk potensi pengembangan wilayahnya. Adapun konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap keanekaragaman informasi yang tersedia dalam skala global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. Indikasi yang akan diwujudkan pada 20 tahun mendatang yaitu tersedianya jaringan jalan antar daerah baik Kondisi Jalan maupun Jenis Jalan yang mendukung dalam mengakses wilayah selanjutnya akan tersedia tersedianya sistem jaringan lainnya seperti: jaringan listrik, telepon seluler, internet dan lainnya.

Kedepannya Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan kualitas SDM, dikarenakan tuntutan profesionalitas ASN yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di kondisi saat ini, tata kelola pemerintahan perlu dibenahi lagi untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelayanan publik yang disediakan oleh aparatur pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam memenuhi kepentingan publik secara substansial, penting untuk memperhatikan kualitas layanan yang diberikan, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan tersebut. Namun, dalam konteks daerah, masalah pelayanan publik telah lama menjadi perhatian masyarakat, terutama karena banyaknya kasus yang menunjukkan bahwa pelayanan tersebut sering kali tidak berpihak pada kepentingan publik.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), riset, serta inovasi merupakan kunci untuk menggerakkan daerah agar dapat berkembang menjadi provinsi yang maju dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengembangkan ekosistem kebijakan yang berbasis Iptek, riset, dan inovasi. Selain itu, pengembangan ini seharusnya menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan. Berbagai isu terkait Iptek dan riset perlu mendapatkan perhatian, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjadi motor penggerak daya saing daerah. Kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor sektor manufaktur juga masih terbilang rendah. Selain itu, sumber daya Iptek, yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti serta perekayasa, serta tingkat produktivitas Iptek yang terukur melalui paten dan publikasi ilmiah, masih belum mencapai potensi optimal. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu alat untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan dalam pembangunan kebudayaan. IPK dapat digunakan sebagai dasar dalam formulasi kebijakan di bidang kebudayaan, serta sebagai acuan untuk koordinasi antar sektor dalam

pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Diperlukan berbagai upaya, langkah, dan strategi untuk memperbaiki ketimpangan gender, isu perkawinan anak, dan pengembangan kebudayaan dalam kerangka pembangunan sosial.

Daya dukung alam sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak. Dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan serta tidak selesainya masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dirumuskan pendekatan baru yang disebut dengan *green economy* (ekonomi hijau) sebagai tatanan ekonomi dengan prinsip penggunaan sumberdaya yang se efisien mungkin dengan menghasilkan karbon seminimum mungkin. Dalam perjalanannya ekonomi hijau masih terdapat banyak kekurangannya karena bersifat eksklusif dan tidak masif sehingga tujuan globalnya membuat emisi gas rumah kaca semakin tidak efisien. Untuk itu dirumuskan pendekatan baru yang dikenal dengan *Blue Economy* (ekonomi biru) yang mempunyai esensi melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah seminimum mungkin sehingga dari segi lingkungan menjadi solusi nyata untuk memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Prinsip ekonomi biru pada tata kelola sektor kelautan dan perikanan sebagai bentuk komitmen pada dunia dimana ekonomi biru merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat dengan mengedepankan keberlanjutan ekosistem laut. Melalui program ekonomi biru diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditingkat daerah maupun ditingkat nasional. Pemerintah daerah harus menetapkan dan menegakkan peraturan yang mendorong keberlanjutan. Hal ini dapat mencakup peraturan lingkungan hidup, standar ketenagakerjaan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah memerlukan kapasitas untuk merancang, menerapkan, dan memantau kebijakan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Hal ini sering kali melibatkan investasi pada sumber daya manusia, pengumpulan data, dan teknologi. Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan dampak keputusan terhadap generasi mendatang. Pemikiran jangka pendek dapat mengarah pada praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Banyak tantangan keberlanjutan yang bersifat global (misalnya perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati). Kerja sama dan perjanjian internasional sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Tata kelola harus fokus pada pembangunan ketahanan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan guncangan ekonomi. Kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dan peran mereka dalam mencapainya. Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pendekatan adaptif dan berulang. Hal ini melibatkan kerja sama di semua tingkat pemerintahan, dari lokal hingga global, dan bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sipil dan sektor swasta. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang kompleks dan memiliki banyak aspek, namun tata kelola yang

efektif merupakan komponen penting dari setiap strategi yang berhasil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Saat ini, Pemerintah Pusat mendorong Kementerian dan Lembaga untuk mengadopsi skema pembiayaan inovatif, seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dukungan ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif pihak swasta. Melalui skema KPBU, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat terus berlanjut selama dan setelah pandemi, sehingga layanan publik yang berkualitas dan sarana dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi secara tepat waktu. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu aktif mendorong penerapan skema pembiayaan inovatif ini, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Infrastruktur tidak dapat dibangun dengan cepat hanya bergantung pada pendanaan tradisional. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menjajaki pola-pola yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk berbagai inovasi seperti pinjaman daerah dan opsi-opsi lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025-2029, dengan fokus pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan infrastruktur. Meskipun Sulawesi Tengah memiliki potensi alam yang melimpah, seperti sumber daya pertanian dan kelautan, pengelolaan yang belum optimal menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus difokuskan pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Peningkatan kualitas sektor pariwisata juga diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih banyak dilakukan kajian mengenai integrasi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dalam satu kerangka strategi pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian juga perlu fokus pada kebijakan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas wilayah, yang dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi. Pengembangan model-model pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons tantangan pembangunan yang ada.

REFERENCE

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1). <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966>
- Dewiana, L. (2022). Analisa Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. *Education Achievement: Journal of Science and Research*. <https://doi.org/10.51178/jsr.v3i1.495>
- Doe, A. (2021). Tourism as an economic driver in Central Sulawesi: Potential and challenges. *Journal of Tourism and Development*, 7(3), 132-148.
- Jasman, A., & Malik, M. (2023). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan. *E-Jkpp*, 9(1). <https://doi.org/10.36448/Ejkpp.V9i1.3110>
- Lestari, L., Rini, D. M., & Dwiyaniti, N. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Trias Politika*, 2(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1469>
- Mait, A. S., Lumolos, J., & Monintja, D. (2020). Analisis penerapan sistem e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah (studi di badan perencanaan pembangunan daerah provinsi sulut). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5).
- Mulalinda, stefly, sumampow, I., & Kimbal, A. (2021). Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1(2).
- Natsir, L. F. (2021). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *FISIP Universitas Wiralodra*, 2(33).
- Pemda Kabupaten Bantul. (2019). Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Bantul. *E-Book*.
- Pemda Kabupaten Gowa. (2019). Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Gowa. *E-Book*.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024. In *Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019*.
- Rahmatullah, A. F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi 2013-2018 Sudahkah Memasukkan Pentingnya Konsep Smart City. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Redaksi, D. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 21(3).
- Ridhani, M. Y., Ridhoni, M., & Priyadharma, A. A. (2021). Isu Strategis Terkait Transportasi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. *SPECTA Journal of Technology*, 5(3). <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.388>
- Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDRA) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11).
- Setianingsih, B., Setyowaty, & Siswidiyanyo. (2019). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrendra) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan). *Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya*

Malang, 1(5).

Smith, J. (2022). Low productivity in the agricultural sector of Central Sulawesi: Challenges and solutions. *Journal of Agricultural Economics*, 15(4), 210-225.

Sugeng, C. (2023). Peran ASN JPT dalam Pengarusutamaan Pengetahuan dan Kearifan Lokal pada Penyusunan Kebijakan Pembangunan IKN. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 4(2).

Tangerang BAPPEDA. (2013). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Pemerintah Kabupaten Tangerang*.

Williams, R. (2023). Infrastructure access and economic development in remote areas of Central Sulawesi. *Journal of Regional Development*, 10(2), 80-95.

Yuyud Susilo. (2020). Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015). *SINAU : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 1(01).
<https://doi.org/10.37842/sinau.v1i01.4>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)